

**KOMPETENSI SATGAS PENANGANAN MASALAH
PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERLINDUNGAN
KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN BANTUL**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana

**Disusun oleh:
Tri Agustin Wulandari**

NIM 22102050023

**Dosen Pembimbing:
Abidah Muflihati, S.Th.I, M.Si**

NIP. 19770317 200604 2 001

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1646/Un.02/DD/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : KOMPETENSI SATGAS PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TRI AGUSTIN WULANDARI
Nomor Induk Mahasiswa : 22102050023
Telah diujikan pada : Selasa, 18 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Abidah Muflihah, S.Th.I., M.Si
SIGNED

Valid ID: 6a8e846fa839a



Penguji I
Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 6a8bc05140dff



Penguji II
Dr. Arin Mamlakah Kalamika, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a8c00ce24db5



Yogyakarta, 18 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED

Valid ID: 6a8e87c021cbb

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Tri Agustin Wulandari

NIM : 22102050023

Judul Skripsi : Kompetensi Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak dalam Perlindungan Korban Kekerasan di Kabupaten Bantul skripsi tersebut sudah memenuhi syarat

- Bebas dari unsur plagiarisme.
- Hasil pemeriksaan similaritas melalui Turnitin menunjukkan tingkat kemiripan sebesar dengan menggunakan setelan "small match exclusion" sepuluh kata.
- Sistematika penulisan telah sesuai dengan Pedoman Penulisan Skripsi yang berlaku.

dan sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 12 Agustus 2026

Mengetahui:

Dosen Pembimbing

Ketua Program studi


Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc., PhD
NIP. 19810823 200901 007


Abidah Muflihati, S.Th., M.Si
NIP. 19770317 200604 2 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Agustin Wulandari
NIM : 22102050023
Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Kompetensi Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak dalam Perlindungan Korban Kekerasan di Kabupaten Bantul adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Agustus 2026

Yang menyatakan,



Tri Agustin Wulandari
Tri Agustin Wulandari
NIM 22102050023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Nama : Tri Agustin Wulandari
NIM : 22102050023
Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan menggunakan jilbab dalam foto ijazah saya, sebagai bentuk kesadaran dan komitmen pribadi dalam menjalankan ajaran agama Islam. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab, untuk digunakan sebagaimana mestinya sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi penyusunan skripsi.

Yogyakarta, 12 Agustus 2026

Yang menyatakan



Tri Agustin Wulandari

22102050023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa hormat dan syukur, skripsi ini peneliti dedikasikan untuk Almarhumah Ibu tercinta. Terima kasih atas perjuangan, kasih sayang, dan kehangatan selama kebersamaan peneliti. Meskipun raga telah berpisah, setiap nasihat dan kasih sayangnya menjadi amerta dalam setiap perjalanan peneliti. Untuk Bapak dan kakak-kakakku tersayang, yang tak henti-hentinya memberikan dorongan kepada peniti untuk terus berjuang menjadi pribadi yang lebih baik. Keluarga adalah pengingat akan tujuan dan makna dari setiap proses yang dijalani.

Diri saya sendiri, Tri Agustin Wulandari, yang telah mampu melawan ketidakmungkinan sampai sejauh ini. Terima kasih karena sudah melawan rasa takut dan tidak memilih untuk berhenti.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Jika bukan karena Allah yang memampukan, mungkin aku sudah lama
menyerah.”

(Al Insyirah 5-6)

“Apabila yang di depan membuatmu takut, yang di belakang membuatmu terluka,
lihatlah ke atas, sungguh Allah tidak pernah gagal menolongmu.”

(Jejak Rasa)

“Rindu kepada ibu memang tidak akan pernah usai. Maka, setiap langkah menuju
keberhasilan adalah cara terbaik untuk mengenang cinta dan pengorbanannya.”

(Tri Agustin Wulandari)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, berkah dan karunia-Nya, dan dengan dorongan keluarga yang mendamba putri bungsunya menyandang gelar sarjana, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kompetensi Satgas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak dalam Perlindungan Korban Kekerasan di Kabupaten Bantul”. Skripsi ini di susun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi masih jauh dari kata sempurna. Namun demikian, penyelesaian skripsi ini dapat terwujud atas bimbingan yang menuntun, doa yang terus dipanjatkan dan dukungan yang menguatkan. Dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih pada pihak-pihak berikut:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Muhammad Izul Haq, S.Sos., M.Sc., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu dan mengusahakan mahasiswanya selama masa perkuliahan.

4. Ibu Abidah Muflihati, S.Th.I., M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran, bimbingan dan perhatian yang ibu berikan selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ibu dosen dan staf akademik program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan ilmu, wawasan dan membantu penulis selama masa perkuliahan berlangsung.
6. Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bantul, Ketua dan seluruh anggota Satgas PPA Kabupaten Bantul, terima kasih atas bantuan yang diberikan selama proses menjalani penelitian.
7. Almh. Ibu Sugiyanti, pintu surgaku yang telah menjadi bidadari surga, yang selalu penulis rindukan dan cintai. Semoga ibu melihat perjuangan putri bungsunya, dari tempat terbaik disisi-Nya. Andai ibu masih menemani perjalanan ini, penulis ingin memeluk dan menyampaikan rasa rindu, permohonan maaf dan rasa terima kasih untuk tidak pernah lelah menyayangi penulis. Ibu adalah alasan penulis untuk tetap melangkah hingga kakinya hingga sejauh ini.
8. Bapak Jliteng Marwadi, terima kasih atas doa, dukungan dan perjuangan untuk kehidupan penulis. Beliau memang tidak pernah merasakan bangku perkuliahan, namun beliau mampu memotivasi penulis hingga menyelesaikan studi sampai menjadi sarjana.

9. Kakak-kakak penulis, Mas Andi, Mbak Beta, Mbak Dika, dan Mas Aan, terima kasih atas dukungan, doa, dan segala upaya untuk mencukupi kebutuhan penulis hingga saat ini. Terkhusus untuk kakak perempuan penulis, terima kasih telah menjadi perisai dalam badai yang selalu mengusahakan penulis sejak menyelesaikan pendidikan sekolah dasar. Terima kasih atas segala rasa mengalah, dan perjuangan untuk penulis untuk bisa melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Rasanya tidak cukup untuk penulis menyampaikan terima kasih kepadanya dalam lebar skripsi ini.
10. Untuk ketiga keponakan penulis, Zahra, Khansa, dan Gendhis. Terima kasih atas kehangatan, canda tawa, pelukan, serta motivasi yang selalu diberikan di sela-sela penyusunan skripsi ini. Selanjutnya, biarlah perjuangan ini tetap abadi hingga kalian dapat merasakan bangku perkuliahan dan tumbuh lebih baik dari penulis.
11. Keluarga besar Simbah Martowiyadi, terima kasih atas doa, dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis. Untuk Mamak Suti, ucapan terima kasih selalu terucap atas segala dukungan materil yang diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Selanjutnya, untuk Pakde Tarjiyono dan Mamak Marinah, terima kasih telah menjadi rumah kedua untuk penulis, atas segala doa dan rasa kasihnya yang selalu siap menjadi baris terdepan dalam membela penulis. Dan untuk kakak-kakak sepupuku, Mbak Bisyaroh, Mbak Dewi, dan Mbak Dwi, penulis ucapkan rasa terima kasih atas segala dukungan baik materil maupun non materil sehingga penulis dapat menjalani perkuliahan dengan lancar.

12. Ika Zulfa Meiliya Asyarah, adik penulis semoga semesta selalu berpihak kepadamu, terima kasih atas bantuan, pengertian, dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan perjalanan ini.
13. Teman-teman penulis, Miftahu Rahman, S.Pd., Pipit, Imel, Bunga, Nuha, Wafiq dan Annisa. Terima kasih atas dukungan, pengertian, doa, dan bantuan yang diberikan selama proses perkuliahan berlangsung.
14. Kelompok KKN 117 UIN Sunan Kalijaga Padukuhan Kleben, terima kasih telah menjadi sahabat dan tempat belajar penerapan ilmu sosial di masyarakat.
15. Teman-teman PPS UPTD PPA Bantul 2026, terima kasih atas bantuan, dukungan, dinamika dan proses belajar menjadi pekerja sosial adalah pengalaman yang tidak dapat terlupa.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
17. Terakhir, penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Tri Agustin Wulandari. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan dan setiap pagi yang disambut rasa keraguan, namun tetap dijalani dengan keberanian. Selamat berjuang, tidak ada yang lebih indah dari menyaksikan proses dan pertumbuhan diri sendiri.

Yogyakarta, 12 Agustus 2026

Tri Agustin Wulandari

22102050023

ABSTRAK

Tri Agustin Wulandari, 22102050023, Kompetensi Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak dalam Perlindungan Korban Kekerasan di Kabupaten Bantul. Skripsi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2026.

Abstrak: Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi permasalahan sosial yang serius di Kabupaten Bantul. Sebanyak 213 kasus tercatat di UPTD PPA Kabupaten Bantul sepanjang tahun 2025, sehingga untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pemerintah Kabupaten Bantul membentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA) sebagai relawan berbasis komunitas untuk mendukung penjangkauan dan perlindungan korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis kompetensi Satgas PPA Kabupaten Bantul dalam penanganan korban kekerasan serta mengkaji bagaimana kompetensi tersebut diwujudkan dalam praktik di lapangan dengan menggunakan Teori Kompetensi Spencer dan Spencer yang mencakup dimensi emosional, intelektual, dan sosial. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode kombinasi (*mixed methods*) model *sequential explanatory* yang terdiri dari tahap kuantitatif deskriptif dan tahap kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kompetensi Satgas PPA Kabupaten Bantul berada pada kategori tinggi (73%), diikuti kategori sedang (21%) dan rendah (6%). Kemudian, temuan kualitatif mengonfirmasi bahwa seluruh informan menerapkan prinsip dasar layanan secara konsisten pada dimensi emosional, sementara pada dimensi intelektual dan sosial menunjukkan masih diperlukan peningkatan kapasitas terhadap anggota Satgas PPA untuk menciptakan pelaksanaan tugas secara optimal.

Kata kunci: Kompetensi, Satgas PPA, Kekerasan Perempuan dan Anak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Tri Agustin Wulandari, 22102050023, Competence of the Task Force for Handling Women and Children's Problems in the Protection of Victims of Violence in Bantul Regency. Thesis of the Social Welfare Science Study Program, Faculty of Da'wah and Communication, Sunan Kalijaga State Islamic University, 2026.

Abstract: *Violence against women and children is still a serious social problem in Bantul Regency. A total of 213 cases have been recorded in the UPTD PPA of Bantul Regency throughout 2025, so to provide guarantees of protection for women and children, the Bantul Regency government established the Task Force for Handling Women and Children's Problems (Satgas PPA) as a community-based volunteer to support outreach and victim protection. This study aims to analyze the competence of the Bantul Regency PPA Task Force in handling victims of violence and examine how these competencies are realized in practice in the field using the Spencer and Spencer Competency Theory which includes emotional, intellectual, and social dimensions. This is done using a combination method approach (mixed methods) of the sequential explanatory model which consists of a descriptive quantitative stage and a qualitative stage. The results of the study show that in general, the competence of the Bantul Regency PPA Task Force is in the high category (73%), followed by the medium (21%) and low (6%) categories. Then, the qualitative findings confirmed that all informants applied the basic principles of service consistently on the emotional dimension, while on the intellectual and social dimensions showed that there was still a need to increase the capacity of PPA Task Force members to create optimal task implementation.*

Keywords: *Competence, PPA Task Force, Violence against Women and Children*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	20
1. Teori Kompetensi.....	20
2. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.....	27
G. Metodologi Penelitian.....	34
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Lokasi Penelitian.....	36
3. Sumber Data.....	36
4. Subyek dan Obyek Penelitian.....	37
5. Variabel penelitian.....	37
6. Metode Kuantitatif.....	37
7. Metode Kualitatif.....	45
8. Metode Kombinasi (<i>Mixed Methods</i>).....	48
H. Sistematika Pembahasan.....	49
 BAB II GAMBARAN UMUM SATUAN TUGAS (SATGAS) PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) KABUPATEN BANTUL ...	 51
A. Gambaran Umum Kabupaten Bantul.....	51
1. Kondisi Geografis dan Administratif Kabupaten Bantul.....	51
2. Kondisi Demografi Kabupaten Bantul.....	52
3. Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bantul.....	53
B. Gambaran Umum Satgas PPA Kabupaten Bantul.....	55

1.	Sejarah Satgas PPA Kabupaten Bantul.....	55
2.	Karakteristik Satgas PPA Kabupaten Bantul	57
3.	Profil Responden Penelitian	58
4.	Struktur Koordinasi Kelembagaan	60
5.	Fungsi Satgas PPA Kabupaten Bantul	62
6.	Tugas Satgas PPA Kabupaten Bantul	62
7.	Prinsip-Prinsip Satgas PPA Kabupaten Bantul.....	63
8.	Struktur Organisasi Satgas PPA Kabupaten Bantul.....	65
8.	Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Satgas PPA.....	69
9.	Mekanisme Kerja Satgas PPA Kabupaten Bantul	70
10.	Pembinaan dan Pendanaan.....	74
 BAB III KOMPETENSI SATUAN TUGAS (SATGAS) PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM PRAKTIK PENANGANAN KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN BANTUL.....		
A.	Kompetensi Satgas PPA Kabupaten Bantul	76
1.	Uji Validitas	76
2.	Uji Reabilitas	78
3.	Analisis Hipotetik.....	78
4.	Analisis Statistik Empiris	79
5.	Kategorisasi Kompetensi Satgas PPA Kabupaten Bantul.....	80
B.	Penerapan Kompetensi Satgas PPA dalam Penanganan Korban Kekerasan di Kabupaten Bantul.....	89
1.	Kategori Kompetensi Tinggi	89
2.	Kategori Kompetensi Sedang.....	112
3.	Kategori Kompetensi Rendah.....	131
 BAB IV PENUTUP		
A.	Kesimpulan	156
1.	Kompetensi Satgas PPA Kabupaten Bantul.....	156
2.	Penerapan Kompetensi Satgas PPA Kabupaten Bantul.....	157
B.	Saran	158
 DAFTAR PUSTAKA.....		
LAMPIRAN.....		
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....		164
Lampiran 2. Pedoman Wawancara.....		168
Lampiran 3. Hasil Olah Data Responden menggunakan SPSS.....		170
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian.....		171
Lampiran 5. Surat Izin Penelitian.....		174
Lampiran 6. Hasil Turnitin.....		175
Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup.....		176

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Definisi Operasional.....	39
Tabel 1. 2 Penilaian Angket.....	42
Tabel 1. 3 Rumus Nilai Hipotetik.....	44
Tabel 1. 4 Rumus Kategorisasi Kompetensi	45
Tabel 2. 1 Komposisi Umur Penduduk Kabupaten Bantul 2025	53
Tabel 2. 2 Data Kasus Kekerasan di Kabupaten Bantul	54
Tabel 2. 3 Karakteristik Responden Penelitian	59
Tabel 2. 4 Struktur Satgas PPA Kabupaten Bantul.....	67
Tabel 3. 1 Uji Validitas Instrumen.....	77
Tabel 3. 2 Hasil Uji Reabilitas Instrumen	78
Tabel 3. 3 Analisis Statistik Hipotetik.....	79
Tabel 3. 4 Kategorisasi Nilai Responden	79
Tabel 3. 5 Analisis Statistik Empiris	80
Tabel 3. 6 Analisis Frekuensi Kategori Kompetensi	80
Tabel 3. 7 Nilai Dimensi Kompetensi	82
Tabel 3. 8 Frekuensi Kompetensi Emosional	84
Tabel 3. 9 Frekuensi Kompetensi Intelektual	85
Tabel 3. 10 Frekuensi Kompetensi Sosial	87



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Letak Geografis Kabupaten Bantul	51
Gambar 2. 2 Struktur Koordinasi Kelembagaan	61
Gambar 2. 3 Mekanisme Kerja Satgas PPA Kabupaten Bantul	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan terus berulang di berbagai negara dan daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Bantul. Kekerasan tidak hanya melanggar hak asasi manusia, namun dapat menimbulkan dampak jangka pendek seperti luka fisik pada korban serta menimbulkan dampak jangka panjang yang mempengaruhi kondisi psikologis, fisik, serta keberfungsian sosial korban.¹ Permen PPPA No.4 Tahun 2018 menjelaskan perempuan dan anak termasuk kategori kelompok rentan, mengingat keduanya mudah menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia, sehingga diperlukan pendampingan dan penanganan khusus untuk memastikan hak-hak mereka dapat terpenuhi.² Status perempuan sebagai kelompok rentan tidak berarti perempuan lemah, melainkan budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada peran domestik.

Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Tahun 2025 menunjukkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia

¹ Safrida Zahra, "Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023," *Jurnal Gema Keadilan* 10, no. 3 (2023): 115–26.

² "Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, diakses 28 Maret 2026."

sebanyak 35.020 kasus, yang terdiri dari 21.352 kasus terjadi pada anak dan 13.668 kasus dialami oleh perempuan.³ Angka tersebut menunjukkan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Sebagai bentuk komitmen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), yang selanjutnya akan disebut Kemen PPPA, membentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak yang diatur dalam Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2017. Satuan tugas tersebut dibentuk untuk menangani masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke organisasi layanan perempuan dan anak yang telah dibentuk pemerintah daerah, yang selanjutnya disebut Satgas PPA. Pembentukan Satgas PPA dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan setiap wilayah provinsi, kabupaten atau kota, maupun desa.

Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, dalam penulisan selanjutnya akan disebut sebagai DP3AP2KB merupakan sektor utama dalam upaya layanan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bantul. Adapun dalam operasional pelayanan perlindungan perempuan dan anak dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut UPTD PPA Kabupaten Bantul sebagai lembaga di bawah naungan DP3AP2KB Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan penyelesaian kasus secara menyeluruh dimulai dari asesmen, pendampingan psikologis dan hukum, hingga rujukan lanjutan untuk penanganan korban.

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Data Jumlah Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Indonesia Tahun 2025," diakses pada 3 Februari 2026.

Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 213 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Bantul.⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi isu nyata yang dihadapi di tingkat daerah khususnya di Kabupaten Bantul. Dalam praktik penyelenggaraan pelayanan perlindungan perempuan dan anak, keberadaan UPTD PPA Kabupaten Bantul tidak dapat dilepaskan dari dukungan aktor-aktor lain di tingkat komunitas. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bantul membentuk Satgas PPA bertujuan untuk menekan masalah perempuan dan anak, untuk mewujudkan Kabupaten Bantul Ramah Anak.⁵

Ketertarikan peneliti terhadap topik penelitian berawal dari pengalaman magang praktik pekerjaan sosial selama tiga bulan yang dilaksanakan di UPTD PPA Kabupaten Bantul. Selama menjalani praktikum, peneliti mengikuti beberapa rapat penanganan kasus yang turut melibatkan Satgas PPA, khususnya dalam penjangkauan korban. Penjangkauan tersebut merupakan langkah awal untuk identifikasi dan memastikan kondisi korban. Melalui pengamatan tersebut, peneliti memahami bahwa meskipun Satgas PPA Kabupaten Bantul berkedudukan sebagai relawan yang membantu UPTD PPA Kabupaten Bantul, atau bukan sebagai pihak yang menyelesaikan permasalahan korban secara menyeluruh, tetapi peran penjangkauan yang dijalankan bersentuhan langsung dengan kondisi psikologis dan keselamatan korban. Hal tersebut menimbulkan ketertarikan peneliti untuk

⁴ “Dokumen Arsip Data Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bantul Tahun 2025, diakses pada 18 Juni 2026.”

⁵ “Kukuhkan Satgas PPA, Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak di Bantul, diakses pada 16 Juni 2026,” 2023.

mengkaji lebih dalam, terkait kemampuan yang dibutuhkan oleh Satgas PPA Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas di lapangan.

Satgas PPA Kabupaten Bantul telah terbentuk sejak tahun 2015 dan terus mengalami penguatan kelembagaan hingga diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 173 Tahun 2025, Tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak. Hingga saat ini, anggota Satgas PPA Kabupaten Bantul berjumlah 110 relawan yang tersebar di 75 kalurahan. Berdasarkan analisis terhadap Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2017 serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Satgas PPA keanggotaan Satgas PPA berasal dari unsur masyarakat seperti keluarga, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh adat, pengacara, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesehatan, psikiater, atau anggota satgas lain terkait perempuan dan anak yang telah dibentuk daerah.⁶ Akan tetapi, dalam petunjuk teknis tersebut peneliti menemukan bahwa rekrutmen keanggotaan Satgas PPA tidak mengatur batasan minimal pendidikan akhir anggota, serta dalam proses rekrutmen anggota Satgas PPA Kabupaten Bantul lebih menekankan pada komitmen dan kepedulian sosial dibandingkan persyaratan pendidikan formal.⁷

Satgas PPA Kabupaten Bantul bertugas untuk melakukan penjangkauan, identifikasi kebutuhan, perlindungan di lokasi kejadian, rujukan dan rekomendasi layanan kepada UPTD PPA maupun lembaga terkait, pelaporan hasil penanganan

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Petunjuk Teknis Pembentukan Satgas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak” (2017), <https://kemenpppa.go.id/buku/petunjuk-teknis-pembentukan-satuan-tugas-penanganan-masalah-perempuan-dan-anak-di-daerah>.

⁷ *Ibid.* hlm.4.

secara berkala, serta pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan kepada masyarakat.⁸ Hal tersebut menarik untuk dikaji, mengingat Satgas PPA Kabupaten Bantul memiliki fungsi krusial dan perbedaan pengalaman serta pendidikan yang cukup beragam yang dapat mempengaruhi dalam bertindak dan bersikap di lapangan untuk melakukan penjangkauan korban serta sosialisasi sebagai langkah preventif. Oleh karena itu, responden dalam penelitian ini tidak terikat pada profesi maupun tingkat pendidikan tertentu, atau dapat dikatakan sebagai satgas non-profesional.

Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti terkait peran dan implementasi tugas serta faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan tugas Satgas PPA baik di tingkat kalurahan maupun kabupaten. Beberapa kajian tersebut masih secara umum belum spesifik membahas dan melihat kompetensi tugas pelaksana di lapangan. Selain itu, peneliti belum menemukan penelitian terkait Satgas PPA Kabupaten Bantul. Penelitian terdahulu sebatas peran lembaga layanan perempuan dan anak di tingkat daerah, yang lebih banyak menitikberatkan pada aspek institusional dibandingkan kapasitas individu pelaksana. Disisi lain, sejumlah kajian mengenai kompetensi aktor perlindungan korban kekerasan di kancah internasional menunjukkan bahwa kompetensi petugas di lapangan adalah hal yang sangat penting bagi efektivitas penjangkauan dan pendampingan korban. Meskipun dilakukan oleh pihak non-profesional berbasis komunitas, dengan adanya

⁸ “Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 173 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2025-2030.” <https://jdih.bantulkab.go.id/produk hukum/detail.html/6169/keputusan-bupati-tahun-2025-nomor-173>.

dukungan, pembinaan, pelatihan dan pengalaman praktik di lapangan yang terorganisir dengan baik dapat menentukan efektivitas pelayanan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kompetensi Satgas PPA Kabupaten Bantul dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Analisis dilakukan dengan Teori Kompetensi Spencer dan Spencer yang mencakup aspek pengetahuan, emosional, dan sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap optimalisasi sistem penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bantul serta menjadi dasar evaluasi dan pengembangan program peningkatan kapasitas relawan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

1. Sejauh mana kompetensi yang dimiliki Satgas PPA dalam penanganan korban kekerasan di Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana kompetensi tersebut diwujudkan dalam praktik penanganan korban kekerasan di lapangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kompetensi yang dimiliki oleh Satgas PPA dalam penanganan korban kekerasan di Kabupaten Bantul.
2. Menganalisis bagaimana kompetensi tersebut diwujudkan dalam praktik penanganan korban kekerasan di lapangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial, khususnya dalam praktik perlindungan sosial bagi kelompok rentan yaitu perempuan dan anak korban kekerasan. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai konsep kompetensi dalam praktik perlindungan dan pelayanan sosial melalui penerapan Teori Kompetensi Spenser dan Spencer. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas khazanah teori dan praktik Kesejahteraan Sosial yang berorientasi pada perlindungan, pemberdayaan, serta pemulihan fungsi sosial korban kekerasan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga (DP3AP2KB dan UPTD PPA Kabupaten Bantul)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam upaya penguatan kapasitas kelembagaan, khususnya dalam pembinaan, pengembangan kompetensi, serta peningkatan kualitas pelayanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak secara lebih efektif dan berkelanjutan.

b. Bagi Satgas PPA Kabupaten Bantul

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana refleksi dan evaluasi dalam memahami serta mengembangkan kompetensi yang dimiliki, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap profesional dalam penanganan korban kekerasan. Selain itu, dapat mendorong peningkatan kapasitas dan profesionalitas Satgas PPA dalam menjalankan peran sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial di tingkat masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu komponen penting dalam penelitian karya tulis ilmiah yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari penelitian terdahulu berupa teori, metode, atau pendekatan yang bersumber dari buku, jurnal, skripsi, dan artikel yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut digunakan sebagai landasan teoritis dan kerangka berpikir dalam menganalisis permasalahan penelitian, serta merumuskan hipotesis yaitu sebagai berikut.

Pertama, Dwi Purnani dan Muhammad Farid Ma'ruf (2018), dalam penelitiannya yang berjudul "Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak dalam *Perspektif New Public Service* (Studi pada Peran Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kelurahan Kaliombo Kota Kediri) tahun 2018 dalam Jurnal Publika memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana peran Satgas PPA dalam menangani permasalahan seksual di Kelurahan Kaliombo Kota Kediri. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini berfokus pada peran Satgas PPA dengan menggunakan tujuh prinsip paradigma *New Public Service* menurut Denhardt dan Denhardt. Hasil dari penelitian tersebut adalah dari 7 indikator prinsip paradigma *New Public Service* (Denhardt, Denhardt 2003) hanya 4 peran Satgas PPA yang sudah berjalan sesuai dengan prinsip paradigma tersebut diantaranya yaitu menerima pengaduan permasalahan, menjadi mediator ketika ada permasalahan, dan melakukan pendampingan permasalahan.

Sementara itu, peran melakukan kerja sama intern dan ekstern, melakukan pemetaan, menjaga lingkungan dari segala bentuk kekerasan, menjaga lingkungan agar kondusif, dan mengondisikan sifat peduli serta empati berjalan belum optimal.⁹ Sehingga dalam pelaksanaan tugas satgas PPA dalam penanganan korban kekerasan belum berjalan secara optimal. Persamaan penelitian yang dilakukan terletak pada objek pembahasan terkait peran serta kompetensi yang harus dimiliki satuan tugas PPA dalam melakukan pelayanan sosial kepada korban kekerasan . Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian , Dimana peneliti memilih subjek Satgas PPA Kabupaten Bantul, sedangkan Dwi Purnani dan Muhammad Farid Ma'ruf,. menggunakan subjek penelitian Satgas PPA di Kelurahan Kaliombo Kota Kediri. Selain itu, peneliti menggunakan metode penelitian *mixed-methods* untuk memahami kondisi dan situasi di lapangan secara mendalam.

⁹ Dwi Purnani dan Muhammad Farid Ma'ruf, "Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif New Public Service (Studi pada Peran Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kelurahan Kaliombo Kota Kediri)," *The Journal of Universitas Negeri Surabaya* 6, no. 8 (2018).

Kedua, Utari Murni Adhi dan Susi Sulandari dalam penelitian yang berjudul “Peran Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri” tahun 2019 dalam *Journal of Management and Public Policy* bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Satgas PPA serta faktor penghambat dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut bahwa Satgas PPA Desa Jatirejo berdasarkan pelaksanaan 6 (enam) kewajiban tugas diantaranya yaitu penerimaan pengaduan, penjangkauan korban, identifikasi korban, perlindungan korban, pengungsian korban, rekomendasi korban serta pelaksanaan sosialisasi dapat terlaksana sesuai dengan kewajibannya.

Terdapat dua faktor penghambat peran Satgas PPA Desa Jatirejo, pertama yaitu pada keterbatasan waktu anggota Satgas PPA serta belum adanya pelatihan yang kontinyu mengenai perlindungan anak. Kedua, belum terdapat anggaran yang dialokasikan kepada Satgas PPA Desa Jatirejo sehingga pelaksanaan kegiatan masih menggunakan dana pribadi.¹⁰ Persamaan penelitian terletak pada kompetensi atau tugas yang harus dilaksanakan Satgas PPA dalam perlindungan korban kekerasan. Perbedaan penelitian terkait subjek penelitian dimana peneliti menggunakan subjek Satgas PPA Kabupaten Bantul sementara penelitian Utari Murni Adhi dan Susi

¹⁰ Utari Murni Adhi dan Susi Sulandari, “Peran Satgas Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri,” *Jurnal of Public Policy and Management Review* 8, no. 2 (2019): 469–81.

Sulandari menggunakan subjek Satgas PPA Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri serta fokus penelitian tidak hanya berfokus pada penanganan korban kekerasan seksual pada anak tetapi peneliti menggunakan objek penanganan korban kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Bantul.

Ketiga, Imroatul Muyassaroh dengan penelitian yang berjudul “Implementasi Tugas SATGAS PPA (Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak) Jombang Terhadap Perlindungan Hak Anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang)” tahun 2023. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis implementasi tugas Satgas PPA Jombang beserta faktor pendukung dan penghambat implementasi tugas terhadap perlindungan hak anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*), Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kerangka berpikir dalam penelitian tersebut yaitu dengan melalui Teori Implementasi Publik serta Teori Perlindungan Hak Anak.

Hasil dari penelitian tersebut adalah implementasi tugas Satgas PPA dapat dilaksanakan melalui sinergi bersama dengan Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan, sehingga dapat meminimalisir permasalahan terhadap perempuan dan anak meskipun belum terlaksana dengan optimal. Faktor pendukung pelaksanaan tugas Satgas PPA Jombang yaitu terjalinnya komunikasi yang baik dengan pihak Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, kebijakan yang terstruktur dan lengkap serta sarana dan prasarana yang mendukung. Adapun faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran

pengurus Pondok Pesantren Darul Ulum dan orang tua dalam menangani masalah perempuan dan anak.¹¹ Persamaan penelitian dilihat melalui tema penelitian terkait implementasi tugas Satgas PPA dalam perlindungan perempuan dan anak sedangkan perbedaan penelitian terletak pada subjek penelitian peneliti yakni pada satgas PPA Kabupaten Bantul serta fokus penelitian yang menitikberatkan pada kompetensi Satgas PP Kabupaten Bantul dalam penanganan korban kekerasan pada perempuan dan anak menggunakan metode penelitian *mixed-methods* untuk mengkaji permasalahan secara mendalam.

Keempat, Vienza Leana Furi dan Rosalia Indriyati (2020) dalam jurnal kewarganegaraan dengan penelitian yang berjudul “Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan” yang berlokasi di Kabupaten Bantul. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran UPTD PPA Kabupaten Bantul dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan serta mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA Kabupaten Bantul dalam pendampingan korban kekerasan melalui metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut adalah peran UPTD PPA Kabupaten Bantul dalam pendampingan korban kekerasan yaitu memberikan pendampingan pemulihan kesehatan kepada perempuan korban kekerasan, memberikan pendampingan psikologis kepada perempuan korban kekerasan, memberikan pendampingan dalam

¹¹ Imroatul Muyassaroh, “Implementasi Tugas Satgas PPA (Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak) Jombang terhadap Perlindungan Hak Anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023).

hukum kepada perempuan korban kekerasan, peran memberikan psikoedukasi di lingkungan sekitar korban, dan peran memberikan rehabilitasi sosial kepada korban kekerasan.

Selain itu, kendala dalam proses pelaksanaan pelayanan UTD PPA Kabupaten Bantul menurut Vienza yaitu kurangnya sumber daya manusia yaitu tidak ada konselor psikologi laki-laki serta adanya perempuan korban kekerasan yang tidak ingin melaporkan kasus kekerasan yang dialami.¹² Persamaan penelitian dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti yaitu mengkaji isu perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan serta menyoroti bagaimana praktik pelayanan di lapangan khususnya dalam pendampingan korban kekerasan. Perbedaan penelitian terletak pada fokus kajian, subjek penelitian, serta pendekatan metodologi penelitian.

Dimana fokus kajian peneliti terletak ada kompetensi Satgas PPA dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bantul sehingga tidak terfokus pada korban kekerasan perempuan serta subjek penelitian peneliti yaitu Satgas PPA Kabupaten Bantul. Selain itu, peneliti menggunakan metode gabungan *mixed methods* untuk melihat tingkat kompetensi Satgas PPA Kabupaten Bantul serta memahami bagaimana kompetensi tersebut dilakukan dalam penanganan kasus di lapangan.

¹² Viezna Leana Furi dan Rosalia Indriyati Saptatiningsih, "Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan," *Jurnal Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020).

Kelima, Martine Hawkes, Amanda Paton dan Nada Ibrahim tahun 2025 dalam penelitian yang berjudul “*Meeting the Training Needs of a Child-Protection Workforce: Perspectives on Professional Certificates in Understanding, Assessing, and Responding to Childhood Trauma*”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis efektivitas program sertifikat profesional yang diberikan oleh *Australian Centre for Child Protection* untuk meningkatkan kemampuan aktor perlindungan anak korban kekerasan dalam memahami, menilai, dan merespons serta bekerja secara langsung dengan korban dampak kekerasan.¹³ Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed-methods*), dengan pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur, *focus group* dan survei untuk mengevaluasi efektivitas sertifikat profesional terhadap praktik praktisi dalam pengembangan kompetensi sesuai dengan bidang kerja di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program sertifikat profesional dapat membantu meningkatkan kompetensi profesional yang meliputi pengetahuan, keterampilan, praktik, meningkatkan kemampuan praktisi non-spesialis di lingkungan masyarakat untuk mengembangkan kapasitas dalam memberikan intervensi terhadap korban yang mengalami trauma. Subjek penelitian terdiri dari lulusan program *Professional Certificates in Childhood Trauma* serta *staff University of South Australia* yang terlibat dalam pengembangan dan penyampaian sertifikat profesional. Program sertifikat profesional tersebut di tujukan kepada praktisi yang bekerja secara langsung dengan anak-anak dan remaja yang terkena dampak

¹³ Martine Hawkes, Amanda Paton, dan Nada Ibrahim, “Meeting the Training Needs of a Child-Protection Workforce: Perspectives on Professional Certificates in Understanding, Assessing, and Responding to Childhood Trauma,” *Social Work Education* 44, no. 3 (2025): 431–51.

pelecehan di *South Australia*. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa kompetensi aktor perlindungan anak tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh pelatihan, pengalaman praktik, penggunaan materi pembelajaran berbasis kasus nyata, serta kesempatan kolaborasi dan pembelajaran bersama praktisi lain.

Penelitian Hawkes dkk. memiliki relevansi dengan penelitian ini, dengan menunjukkan bahwa kompetensi aktor atau praktisi perlindungan korban dapat dikembangkan melalui pembinaan, pelatihan, dan pengalaman di lapangan. Dimana kompetensi merupakan aspek penting dalam mendukung kualitas perlindungan terhadap anak korban kekerasan sehingga kompetensi aktor perlindungan anak dapat dilihat melalui keterampilan, pengetahuan dan praktik di lapangan. Namun demikian, penelitian Hawkes dkk. lebih berfokus pada pengembangan kompetensi tenaga kerja perlindungan anak melalui sertifikasi profesional, sedangkan penelitian ini berfokus pada kompetensi Satgas PPA sebagai aktor perlindungan berbasis masyarakat dalam melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak.

Keenam, Karen Schucan Bird, Nicola Stokes, Carol Rivas, dkk. dalam penelitian yang berjudul “*Training Informal Supporters to Improve Responses to Victim-Survivors of Domestic Violence and Abuse: A Systemic Review*” tahun 2024 dalam *Jurnal Trauma, Violence, & Abuse Sage Publications*, bertujuan untuk mengkaji efektivitas pendidikan dan pelatihan bagi pendukung informal (*informal supporters*), seperti teman, anggota keluarga, rekan kerja, dan anggota komunitas maupun individu non-profesional yang memiliki peran penting dalam mendukung

korban selama dan setelah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method review* dengan menggabungkan temuan kuantitatif dan kualitatif dari berbagai penelitian terkait pelatihan bagi pendukung informal korban kekerasan.

Subjek dalam penelitian tersebut adalah pendukung informal yang terdiri dari pemimpin agama, anggota masyarakat, teman sebaya, rekan kerja, pasangan atau anggota keluarga yang tidak melakukan kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan mampu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kepercayaan diri, motivasi, serta kemampuan merespons korban kekerasan. Sehingga, pendukung informal dapat mengenali tanda-tanda kekerasan, memahami dampak kekerasan terhadap korban serta memiliki kemampuan untuk merespons dengan tepat seperti merujuk korban ke layanan lanjutan.¹⁴

Penelitian Schucan Bird dkk. memiliki relevansi dengan penelitian penulis dikarenakan sama-sama membahas pentingnya peningkatan kompetensi individu yang terlibat dalam pelayanan perlindungan korban kekerasan melalui penguatan pengetahuan, keterampilan, dan peningkatan kapasitas dalam menjalankan fungsi perlindungan. Namun, penelitian tersebut berfokus pada efektivitas pelatihan bagi pendukung informal korban kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan penelitian penulis berfokus pada kompetensi Satgas PPA sebagai aktor perlindungan berbasis

¹⁴ Karen Schucan Bird, Nicola Stokes, dan Carol Rivas, "Training Informal Supporters to Improve Responses to Victim-Survivors of Domestic Violence and Abuse: A Systemic Review," *Trauma, Violence and Abuse* 25, no. 2 (2024).

masyarakat dalam perlindungan korban kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Bantul.

Ketujuh, Muhammad Fahmi dalam penelitian yang berjudul “Peran DPPA Perlindungan Anak dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan” tahun 2023 bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kabupaten Bekasi dalam melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan, khususnya dalam aspek perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak korban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, yang melibatkan aparat DPPA serta pihak terkait dalam layanan pendampingan korban. Kerangka teori yang digunakan berpijak pada konsep perlindungan perempuan, peran lembaga pemerintah dalam pelayanan sosial, serta pendekatan pendampingan korban kekerasan berbasis hak asasi manusia.¹⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPPA berperan dalam memberikan pendampingan psikososial, fasilitas layanan kesehatan dan hukum, serta koordinasi lintas sektor, namun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan rendahnya pelaporan dari korban. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama mengkaji penanganan dan pendampingan perempuan korban kekerasan serta keterlibatan lembaga perlindungan di tingkat daerah. Adapun perbedaannya, penelitian

¹⁵ Muhammad Fahmi, “Peran DPPA Perlindungan Anak dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 10 (2023): 3320–24.

Muhammad Fahmi menitikberatkan pada peran institusional DPPA Kabupaten Bekasi sebagai lembaga pemerintah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik mengkaji kompetensi Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bantul, terutama pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap petugas dalam menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kedelapan, Maulida, Yusuf, dan Indra dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Pendamping Sosial dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak pada P2TP2A” dalam *Indonesian Journal of Counseling and Development*, tahun 2020. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian adalah pendamping sosial di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Aceh Selatan. Hasil dari penelitian tersebut adalah kompetensi pendamping sosial belum memenuhi standar kompetensi dikarenakan latar belakang pendidikan, namun demikian prosedur pendampingan yang diberikan oleh pihak P2TP2A sudah berjalan dengan baik.¹⁶

Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada subjek dan metode penelitian yaitu peneliti menggunakan metode *mixed methods* untuk melihat secara lebih mendalam terkait kompetensi satgas PPA kabupaten Bantul sebagai subjek penelitian. Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian penulis dikarenakan sama-sama mengkaji terkait kompetensi

¹⁶ Maulida, M. Jamil Yusuf, dan Syaiful Indra, “Peranan Pendamping Sosial Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A),” *Indonesian Journal of Counseling & Development* 02, no. 01 (2020): 39–51.

pihak yang berperan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta berfokus pada upaya perlindungan korban kekerasan sebagai isu utama.

Berdasarkan telaah dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penanganan kekerasan pada perempuan dan anak telah dilaksanakan tidak hanya di Indonesia melainkan di berbagai negara. Hal tersebut diwujudkan melalui tugas relawan, Satgas PPA, organisasi layanan perempuan yang dibentuk oleh pemerintah, serta organisasi perlindungan perempuan dan anak, akan tetapi dalam pelaksanaan tugas belum sepenuhnya optimal. Kendala yang sering muncul dalam melakukan pelayanan berkaitan dengan terbatasnya sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta faktor internal korban. Fokus analisis dari penelitian terdahulu dapat dilihat melalui aspek kelembagaan, implementasi kebijakan, dan peran institusional dengan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga penelitian tersebut belum memberikan gambaran terukur mengenai kompetensi yang dimiliki individu pelaksana dalam praktik di lapangan.

Penelitian mengenai kompetensi Satgas PPA, khususnya di Kabupaten Bantul, masih terbatas. Sedangkan, analisis kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor krusial dalam menentukan efektivitas perlindungan perempuan dan anak di setiap daerah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menghadirkan nilai kebaruan untuk mengisi kekosongan penelitian sebelumnya, melalui analisis tingkat kompetensi individu pelaksana yaitu Satgas PPA dengan menyajikan gambaran empiris mengenai kompetensi Satgas PPA Kabupaten Bantul. Sejalan dengan hal tersebut, dasar perumusan strategi penguatan penanganan korban

kekerasan melalui integrasi analisis kombinasi penelitian kuantitatif deskriptif dan pendalaman kualitatif.

Hal tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kompetensi Satgas PPA dan memahami dinamika penerapan kompetensi dalam pelaksanaan tugas perlindungan perempuan dan anak. Keberagaman latar belakang, tingkat pendidikan dan kondisi sosial anggota Satgas PPA Kabupaten Bantul turut memperkaya diskursus mengenai penguatan kapasitas Satgas PPA Kabupaten Bantul sebagai upaya perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kompetensi

a. Definisi Kompetensi

Istilah kompetensi berasal dari kata “*competence*” yang berarti kemampuan, kecakapan, dan wewenang.¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menyatakan bahwa kompetensi dapat dipahami sebagai kekuasaan untuk menentukan dan atau memutuskan sesuatu.¹⁸ Definisi tersebut dapat dipahami sebagai otoritas formal dalam menjalankan suatu tugas, namun konsep tersebut terus berkembang dan mengalami perluasan makna yang tidak hanya dilihat sebagai kewenangan tetapi sebagai karakteristik individu yang dapat menentukan kualitas kinerja.

¹⁷ Cindy Fatika Sari, Ibnu Malik Assajad, dan Moch. Isa Ansori, “Kompetensi Individu (Individual Competency),” *Jurnal Ilmiah dan Karya Mahasiswa* 1, no. 4 (2023): 201–14.

¹⁸ “Arti Kata ‘Kompetensi’ menurut KBBI,” KBBI.co.id, diakses 1 Februari 2026, <https://kbbi.co.id/arti-kata/kompetensi>.

Konsep kompetensi lahir dan berkembang di Amerika Serikat melalui McClelland yang menyatakan bahwa kompetensi merupakan komponen penting yang berpengaruh terhadap kinerja individu. Kemudian istilah tersebut dikembangkan oleh beberapa ahli yaitu Boyatzis, kompetensi didefinisikan sebagai kapasitas yang dimiliki individu untuk memenuhi tuntutan pekerjaan dalam organisasi, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Boyatzis menyatakan bahwa kompetensi sebagai seperangkat perilaku yang memiliki perbedaan dari segi tujuan dan sasaran tetapi saling berkaitan satu dan yang lainnya.¹⁹

Woodruffe menjelaskan bahwa *competence* dan *competency* memiliki makna yang berbeda. *Competence* merujuk pada konsep yang berkaitan dengan pekerjaan, yaitu bidang atau wilayah kerja dimana seseorang dapat mencapai kompetensi atau keunggulan. Sementara itu, *Competency* merupakan konsep dasar yang berkaitan dengan individu, yaitu dimensi perilaku yang menjadi landasan tercapainya prestasi unggul (*competent*). Selanjutnya kompetensi menurut Spencer & Spencer yaitu, “*Underlying characteristic of individual which is causally related to criterion referenced effective and or superior performance in a job or situation*”.²⁰ Dengan kata lain, kompetensi dapat dipahami sebagai karakteristik dasar yang melekat pada diri seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerjanya dalam melakukan pekerjaan atau situasi tertentu. Definisi tersebut menekankan bahwa kompetensi bukan sekedar kemampuan yang tampak melainkan mencakup

¹⁹ Parulian Hutapea dan Nurianna Thoha, *Kompetensi Plus* (PT Gramedia Pusaka Utama, 2008),

²⁰ *Ibid.* hlm.20.

aspek mendalam yang dapat mempengaruhi konsistensi perilaku kerja. Menurut Muhaimin kompetensi merupakan serangkaian tindakan cerdas yang disertai tanggung jawab, yang wajib dimiliki seseorang sebagai prasyarat untuk dinyatakan mampu menjalankan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu..²¹

Berdasarkan berbagai definisi tersebut peneliti menggunakan Teori Kompetensi Spencer dan Spencer sebagai landasan konseptual, dalam penelitian kompetensi Satgas PPA dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bantul. Hal tersebut dikarenakan teori ini tidak hanya menekankan aspek pengetahuan dan keterampilan, tetapi mengkaji karakteristik individu yang berhubungan dengan efektivitas kinerja yang dilakukan. Pendekatan ini dinilai relevan untuk menganalisis kompetensi Satgas PPA dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bantul, yang tidak hanya menuntut kemampuan teknis, tetapi juga sensitivitas, empati, dan konsistensi praktik profesional di lapangan.

b. Jenis-Jenis Kompetensi

Sebagaimana yang diuraikan oleh Eko Hertanto bahwa Spencer dan Spencer membagi kompetensi ke dalam 3 jenis, yaitu:

- 1) Kompetensi emosional, merupakan sikap atau tata cara perilaku seorang individu serta kemampuan untuk mengendalikan diri dan memahami kondisi lingkungan sekitarnya sehingga mampu membentuk emosi yang stabil. Kompetensi ini menjadi sangat penting ketika individu menghadapi tekanan

²¹ Julaili Ismi, "Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Riau" (Universitas Islam Riau, 2021), <https://repository.uir.ac.id/6105/>.

dan berbagai permasalahan di tempat kerja. Adapun ciri-ciri kompetensi emosional meliputi adanya keyakinan diri, kemampuan mengendalikan diri, sikap memahami dan peka terhadap lingkungan, bertanggung jawab, serta kemampuan melakukan penyesuaian diri.

- 2) Kompetensi intelektual, merupakan kemampuan individu yang berkaitan dengan tingkah laku intelektual, baik dalam bentuk kemahiran, pengetahuan, maupun pemahaman dalam konteks profesional. Kompetensi ini tercermin dalam kemampuan individu untuk tetap stabil dan rasional ketika menghadapi berbagai permasalahan di tempat kerja. Ciri-ciri kompetensi intelektual antara lain meliputi kemampuan berpikir konseptual, berpikir analitik, menguasai maklumat atau informasi, berprestasi, memiliki inisiatif dan inovasi, memberikan jaminan kerja yang baik, memiliki kemampuan naratif, kemampuan berbahasa, serta kemahiran praktikal.
- 3) Kompetensi sosial, merupakan sikap atau tingkah laku individu yang menunjukkan kesiapan dalam membina hubungan kerja sama dengan orang lain dalam menghadapi permasalahan di tempat kerja. Kompetensi ini ditandai dengan kemampuan bekerja secara berkelompok, menjalin hubungan kerja yang baik, kepemimpinan secara berkelompok, meningkatkan prestasi pekerja anggota, memiliki kesadaran organisasi, serta kemampuan memengaruhi orang lain secara terbuka.²²

Berdasarkan klasifikasi dimensi kompetensi Spencer dan Spencer, penerapan masing-masing dimensi kompetensi dalam tugas Satgas PPA dianalisis

²² Eko Hertanto, *Toeri Kompetensi Sumber Daya Manusia*, 2017.

menggunakan indikator prinsip-prinsip dan SOP layanan Satgas PPA Kabupaten Bantul, yaitu :

- 1) Kompetensi emosional dalam prinsip pelayanan Satgas PPA Bantul tercermin pada kemampuan relawan dalam mengelola sikap dan perasaan, ketika berhadapan dengan korban dimana hal tersebut telah diatur dalam prinsip-prinsip Satgas PPA sesuai dengan Petunjuk Teknis Pembentukan Satgas PPA yang dikeluarkan oleh KEMEN PPPA tahun 2017.
- 2) Kompetensi intelektual, mencerminkan pemahaman dan kemampuan anggota Satgas PPA Kabupaten Bantul dalam memahami tugas dan fungsi Satgas PPA dalam PERMEN PPA nomor 6 tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak. Hal tersebut sejalan dengan ciri kompetensi intelektual terkait kemampuan berpikir konseptual untuk memecahkan masalah, serta pemahaman dasar hukum yang menjadi acuan dalam proses penanganan korban kekerasan pada perempuan dan anak.
- 3) Kompetensi sosial, merupakan kemampuan anggota Satgas PPA Kabupaten Bantul dalam membangun relasi atau berjejaring dengan *stakeholder* dalam penanganan kasus serta dapat menunjukkan sikap yang setara dan menghormati keberagaman. Dalam penjangkauan kasus sesuai dengan peraturan Satgas PPA dimana keterampilan berkomunikasi dapat mendukung proses wawancara, observasi dan identifikasi kebutuhan korban.

Berdasarkan uraian diatas, ketiga jenis kompetensi tersebut saling melengkapi dan menjadi fondasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Satgas PPA Kabupaten Bantul secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan tiga

jenis kompetensi menurut Spencer dan Spencer yaitu kompetensi emosional, kompetensi intelektual dan kompetensi sosial, sebagai indikator kompetensi Satgas PPA dalam menjalankan tugasnya.

c. Karakteristik Kompetensi

Terdapat 5 (lima) karakteristik kompetensi menurut Spencer dan Spencer diantaranya sebagai berikut :

- 1) *Motives, the things a person consistently thinks about or wants that cause action. Motives 'drive, direct, and select' behavior toward certain actions or goals and away from others.*
- 2) *Traits, Physical characteristic and consistent responses to situations or information.*
- 3) *Self concept, a person's attitudes, values, or self-image.*
- 4) *Knowledge, information a person has in specific content areas.*
- 5) *Skill, the ability to perform a certain physical or mental task.*²³

Motives atau motif, merupakan sesuatu secara konsisten dipikirkan yang menjadi dasar seseorang untuk bertindak. Motif berfungsi untuk menggerakkan, mengarahkan, serta menentukan perilaku individu menuju tindakan atau tujuan tertentu. Menurut Spencer dan Spencer, motif terdiri dari dua aspek utama yaitu orientasi pada pencapaian tugas (*achievement orientation*) serta dampak dan pengaruh (*impact and influence*). Kedua aspek tersebut mencerminkan dorongan untuk mendekati, meyakinkan dan mempengaruhi pihak lain guna memperoleh dukungan terhadap tujuan atau agenda tertentu.

Traits merupakan karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap situasi dan informasi. Karakteristik tersebut meliputi 3 (tiga) aspek yaitu : (1) inisiatif (*initiative*), yakni kemampuan untuk bertindak proaktif tanpa menunggu

²³ *Ibid.* hlm.22.

perintah; (2) Kerja sama tim (*team work and cooperation*), yakni kemauan untuk bekerja secara kooperatif dengan pihak lain, menjadi bagian dalam sebuah tim, serta berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif; (3) mengembangkan orang lain (*developing others*), yaitu kesediaan dan komitmen individu untuk mendorong peningkatan kapasitas orang lain, dasar aspek tersebut terletak pada upaya nyata membantu perkembangan individu lain, bukan semata-mata karena tuntutan peran secara formal.

Self-concept menitikberatkan pada sikap-sikap, nilai-nilai yang dipegang, serta citra diri individu. Karakteristik tersebut merefleksikan bagaimana individu memandang dirinya sendiri mempengaruhi cara bertindak dalam situasi tertentu. *Self-concept* memiliki dua aspek utama yaitu; (1) percaya diri (*self confidence*) yaitu keyakinan terhadap kemampuan diri dalam menyelesaikan sebuah tugas; (2) kontrol diri (*self control*), yaitu kemampuan untuk mengelola emosi serta menahan respons negatif ketika berhadapan dengan tekanan, konflik, perlakuan kurang menyenangkan maupun dinamika dunia kerja.

Knowledge, merupakan sebuah kompetensi yang kompleks. Dimana dalam karakteristik tersebut memperlihatkan individu memiliki kapasitas pengetahuan terhadap suatu bidang. Karakteristik tersebut menunjukkan sejauh mana individu memiliki penguasaan informasi yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya yang dilihat dari dua aspek utama yaitu; (1) *informating seeking*, dimana individu memiliki kecenderungan secara aktif untuk mencari dan memperbarui informasi yang dibutuhkan; (2) keahlian teknis (*technical expertise*), yaitu penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan tertentu, termasuk motivasi

untuk memperluas, memanfaatkan, serta membagikan pengetahuan yang dimiliki secara efektif.

Skill merupakan kemampuan individu untuk melakukan tugas-tugas dengan efektif dan efisien. Karakteristik tersebut memiliki dua aspek yakni; (1) berpikir analisis (*analytical thinking*), yaitu kemampuan memahami situasi dengan menguraikannya dalam bagian-bagian yang spesifik serta mengidentifikasi hubungan dan implikasi secara terperinci; (2) berpikir konseptual (*conceptual thinking*) yaitu kemampuan memahami situasi atau masalah dengan menyatukan berbagai unsur menjadi satu kesatuan untuk memperoleh gambaran secara komprehensif dan bersifat kreatif, konseptual, dan induktif.²⁴

2. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Penelitian ini berfokus pada kompetensi Satgas PPA dalam penanganan korban kekerasan, sehingga diperlukan pemahaman konseptual mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai landasan dalam membatasi ruang lingkup serta konteks penanganan yang dikaji, bukan sebagai teori yang dianalisis secara langsung.

a. Definisi Kekerasan Perempuan dan Anak

Kekerasan menurut John Keane diartikan sebagai bentuk campur tangan fisik yang tidak dikehendaki, baik dilakukan oleh kelompok maupun perorangan terhadap pihak lain, sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif bagi korban, mulai dari trauma, radang, memar, bengkak, sakit kepala, patah tulang, serangan

²⁴ Moehariono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi* (Rajawali Pers, 2014).

jantung, hingga kehilangan anggota tubuh atau bahkan kematian.²⁵ Kekerasan dapat dipahami sebagai berbagai bentuk perilaku yang mengakibatkan penderitaan, baik secara psikologis maupun fisik. Selain itu, Muladi Suryono dalam Erisamdy Prayatna mendefinisikan korban sebagai seseorang yang mengalami kerugian akibat suatu tindakan kejahatan, dan atau rasa keadilannya terganggu secara langsung akibat sebagai sasaran kejahatan.²⁶

Kekerasan terhadap perempuan menurut Pasalbessy didefinisikan sebagai setiap tindakan yang ditujukan kepada seseorang karena statusnya sebagai perempuan, yang dapat menimbulkan penderitaan, baik secara fisik, psikologis maupun seksual.²⁷ Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai segala bentuk perlakuan salah atau tidak layak terhadap anak, yang mengakibatkan cedera fisik, gangguan emosional, kekerasan seksual, kelalaian dalam pengasuhan, maupun eksploitasi untuk tujuan komersial, sehingga dapat mengancam kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, serta tumbuh kembang anak tersebut.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, maupun

²⁵ Mega Oktavia Simamora, Melani Octaviani, dan Dkk, "Dampak Kekerasan Rumah Tangga terhadap Gangguan Kedewasaan Anak," *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 4 (2022): 122–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v2i4.783>.

²⁶ Erisamdy Prayatna, "Pengertian Korban," 2020, <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/02/pengertian-korban.html>.

²⁷ Abdurrahman Alhakim, "Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia" 9, no. 1 (n.d.), <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.

kerugian sosial dan ekonomi, serta berakar pada ketimpangan relasi kuasa dan lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan. Kekerasan tersebut tidak hanya bersifat individual, tetapi juga merupakan permasalahan sosial yang memerlukan penanganan komprehensif melalui pendekatan hukum, sosial, dan kelembagaan guna menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban secara optimal.

b. Jenis-Jenis Kekerasan

Jenis-jenis kekerasan terhadap anak menurut Mulyana W. Kusumah sebagai berikut:

- 1) Kekerasan fisik, merupakan tindakan yang dapat menyebabkan anak mengalami cedera atau penderitaan jasmani pada anak, seperti dipukul, ditampar, dijambak, dicekik, dianiaya, atau diancam dengan benda tajam, sehingga membahayakan keselamatan dan perkembangan fisiknya.
- 2) Kekerasan psikis, merupakan tindakan yang dapat menimbulkan perasaan tidak aman dan tertekan secara emosional, seperti ejekan, penghinaan, ancaman, bentakan, serta dipermalukan di depan umum yang dapat merendahkan martabat korban.
- 3) Kekerasan seksual, merupakan segala bentuk pemaksaan dan tindakan memperdaya anak, untuk melibatkan anak dalam aktivitas seksual, baik secara fisik maupun non fisik, termasuk mempertontonkan dan memproduksi aktivitas pornografi terhadap anak.
- 4) Kekerasan sosial terhadap anak berupa penelantaran dan eksploitasi yang dapat menghambat tumbuh kembang anak seperti tidak terpenuhinya kebutuhan

dasar anak, pengabaian tanggung jawab pengasuhan, termasuk perlakuan diskriminatif atau sewenang-wenang terhadap anak.²⁸

Adapun jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan menurut Widiastuti, sebagai berikut:

- 1) Kekerasan fisik, terhadap perempuan berupa perbuatan yang dapat menyebabkan cedera, rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan pada tubuh korban, seperti diseret, dijambak, dipukul, dilempar, dicekik, disetrum, ditendang, dibacok, dibakar dll.
- 2) Kekerasan psikis, tindakan yang menimbulkan penderitaan mental dan hilangnya rasa percaya diri korban, seperti penghinaan dan merendahkan martabat korban.
- 3) Kekerasan seksual, merupakan segala bentuk tindakan yang meliputi setiap bersifat seksual, dilakukan tanpa persetujuan korban, melalui paksaan atau penyalahgunaan relasi kuasa, seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual.
- 4) Kekerasan sosial, merujuk pada tindakan yang mengisolasi, mendiskriminasi, atau membatasi akses perempuan terhadap relasi sosial dan layanan publik seperti tindakan pengucilan, stigma negatif dan diskriminasi.
- 5) Kekerasan ekonomi, berupa pembatasan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, seperti penelantaran nafkah, atau eksploitasi tenaga kerja.

Secara umum, jenis kekerasan terhadap anak dan perempuan memiliki pola yang serupa yaitu mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, sosial serta ekonomi.

²⁸ Endang Prastini, "Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia," *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 760–70.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa bentuk kekerasan tidak hanya terbatas pada tindakan yang menimbulkan luka fisik tetapi mencakup kondisi mental, eksploitasi seksual, diskriminasi sosial, serta pembatasan terhadap akses sumber daya. Dengan demikian, pemahaman komprehensif sangat diperlukan dalam penelitian ini sebagai landasan konseptual dalam menganalisis bentuk kekerasan serta kebutuhan penanganan yang diperlukan korban.

c. Faktor Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Menurut Eleanor, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Salah satunya kondisi anak yang mengalami cacat tubuh, sehingga anak mudah diperdaya. Selain itu, faktor kemiskinan keluarga, situasi keluarga tunggal akibat perceraian, serta kondisi anak yang berasal dari keluarga *broken home* turut berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan. Faktor lain yang dapat berpengaruh adalah usia orang tua yang belum matang dan kondisi orang tua yang memiliki gangguan mental atau penyakit yang parah.²⁹

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan kekerasan. Faktor pertama adalah masih kuatnya budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki sebagai pihak paling dominan, baik di dalam keluarga maupun di lingkungan sekitar. Selain itu, tekanan ekonomi keluarga turut menjadi pemicu, bersama dengan berbagai tekanan hidup di perkotaan yang mendorong munculnya stres. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah kondisi lingkungan dan beban pekerjaan yang berat, yang dapat meningkatkan temperamen atau emosi

²⁹ Nandang Mulyana, Risna Resnawaty, dan Rudy Saprudin Darwis, "Model Pelayanan Sosial bagi Anak Korban Kekerasan," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 1, no. 2 (2019): 70–141.

seseorang. Di samping itu, pengaruh sosial budaya dalam masyarakat turut berperan dalam menempatkan perempuan dan anak pada posisi yang marginal serta tidak berdaya.

d. Penanganan Korban Kekerasan

Penanganan anak korban kekerasan tidak dapat dipisahkan dari pelayanan yang diberikan. Suharto berpandangan bahwa penanganan bagi anak korban kekerasan dilakukan melalui pemberian pelayanan sosial. Penanganan korban berdasarkan sasaran kelompok mencakup tiga aspek yaitu penanganan yang harus menjangkau seluruh bagian secara merata, kualitas penanganan dapat dipertanggungjawabkan dan , melakukan penanganan secara berkelanjutan.³⁰

Sedangkan, penanganan korban kekerasan terhadap perempuan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan, pendampingan, serta pemulihan terhadap korban secara komprehensif. Penanganan tidak hanya terbatas pada proses hukum, tetapi juga mencakup aspek medis, psikologis, sosial, dan rehabilitatif guna mengembalikan keberfungsian sosial korban secara optimal.

Secara normatif, UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa korban berhak memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Penanganan mencakup layanan pengaduan, pendampingan hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, hingga reintegrasi sosial. Negara melalui lembaga terkait berkewajiban menyediakan

³⁰ *Ibid.*Hlm.31.

layanan yang mudah diakses, cepat, aman, dan berpihak pada korban seperti pelayanan yang diberikan oleh UPTD PPA.

Dalam perspektif pelayanan sosial menurut WHO *Clinical and Policy Guidelines*, penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dapat dipahami melalui pendekatan *victim-centered approach*, yaitu pendekatan yang menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus dihormati martabat, kebutuhan, dan keamanannya. Pendekatan ini menekankan prinsip keselamatan (*safety*), kerahasiaan (*confidentiality*), penghormatan (*respect*), serta tidak menyalahkan korban (*non-judgmental*).³¹

Selanjutnya, konsep *trauma-informed care* menjelaskan bahwa korban kekerasan sering mengalami dampak psikologis jangka panjang, seperti trauma, kecemasan, dan kehilangan rasa aman. Oleh karena itu, proses penanganan harus dilakukan secara sensitif, empatik, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan retraumatisasi. Petugas yang menangani korban dituntut memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang baik, stabilitas emosional, serta pemahaman terhadap dinamika kekerasan berbasis gender.

Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan juga menuntut adanya model pelayanan terpadu (*integrated service model*). Model ini melibatkan koordinasi lintas sektor antara aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, psikolog, serta lembaga perlindungan perempuan dan anak. Kolaborasi ini

³¹ Deva Fionika dan Ririn Indira Putri Enjel, "Perempuan Korban Kekerasan dalam Perspektif Penegakan Hukum dan Pemulihan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Kajian Hukum dan Pemulihan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2025): 88–96, <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp>.

penting agar korban memperoleh layanan yang menyeluruh, mulai dari tahap pelaporan hingga pemulihan sosial.

Dalam konteks kelembagaan di daerah, seperti keberadaan UPTD PPA dan Satgas PPA, penanganan korban tidak hanya berfokus pada aspek administratif dan prosedural, tetapi juga pada kualitas kompetensi petugas dalam memberikan layanan. Keberhasilan penanganan sangat dipengaruhi oleh kemampuan petugas dalam melakukan pendekatan penjangkauan, asesmen awal, pendampingan, serta koordinasi dengan pihak terkait dengan menerapkan prinsip-prinsip serta kode etik praktik di lapangan.

G. Metodologi Penelitian

Secara harfiah penelitian diartikan sebagai “mencari kembali” sebuah kebenaran, atau solusi dari suatu masalah. Sugiyono, metode penelitian secara umum dijelaskan sebagai cara ilmiah dalam memperoleh data untuk suatu tujuan serta kegunaan tertentu. Proses penelitian secara sederhana dijelaskan oleh Suliyanto melalui beberapa tahapan, tahap pertama yaitu *Input*, merupakan proses penelitian yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian. Tahap kedua yaitu proses, yang merupakan inti dari kegiatan penelitian, analisis, dan interpretasi data menjadi informasi melalui pengumpulan data dengan turun ke lapangan. Tahap ketiga yaitu *output*, merupakan tahapan penarikan kesimpulan dari hasil analisis.³²

³² Marisi Butarbutar, Hastin Umi Anisah, dan Dkk., *Buku Digital Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner* (CV. Media Sains Indonesi, 2022), https://repositori.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/33948/Buku_Digital_Pengantar_Metodologi_Penelitian.pdf?sequence=1.

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kombinasi (*mixed methods*), menurut Johnson dan Cristensen dikutip dari Sugiyono, metode penelitian kombinasi berasal dari penggabungan filsafat metode kuantitatif (positivistik) dan metode kualitatif (postpositivistik/interpretif) yang disebut filsafat pragmatik. Selain itu, Creswell dalam Sugiyono juga menyatakan bahwa “*mixed methods research is an approach to unquiry that combines or associated both qualitative forms of research,*” yang artinya bahwa metode kombinasi merupakan pendekatan penelitian dengan menggabungkan serta menghubungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.³³ Selanjutnya, Sugiyono mendefinisikan metode *mixed methods* merupakan metode penelitian yang memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan dalam kegiatan penelitian, bertujuan untuk memperoleh data yang valid, komprehensif, objektif, dan reliabel.³⁴

Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran secara komprehensif dan mendalam terkait kompetensi Satgas PPA dalam penanganan korban kekerasan di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menerapkan model *sequential explanatory*, kombinasi berurutan dimana tahap pertama penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang mengukur tingkat kompetensi Satgas PPA Kabupaten Bantul. Tahap kedua, metode kualitatif digunakan untuk menggambarkan

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (CV Alfabeta, 2023).

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) Dengan 9 Desain* (CV Alfabeta, n.d.).

penerapan kompetensi yang dimiliki oleh Satgas PPA dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bantul.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah kerja Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Subjek Penelitian yaitu Satgas PPA yang berada di bawah koordinasi DP3AP2KB Kabupaten Bantul. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas data, ketersediaan responden, serta relevansi konteks penelitian dengan bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial, khususnya dalam aspek pelayanan sosial dan perlindungan kelompok rentan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung melalui kegiatan pengumpulan data di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari Ketua Satgas PPA Kabupaten Bantul serta anggota Satgas PPA melalui penyebaran angket, wawancara, serta observasi terkait pelaksanaan tugas penanganan korban kekerasan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti dokumen resmi, laporan kegiatan, peraturan perundang-undangan, arsip kelembagaan, buku, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang relevan dengan penelitian tentang kompetensi dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

4. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah seseorang yang dapat menjadi sumber memperoleh informasi terkait permasalahan yang diteliti. Subyek utama dalam penelitian ini adalah anggota Satgas PPA Kabupaten Bantul. Adapun obyek dalam penelitian ini adalah penerapan kompetensi Satgas PPA Kabupaten Bantul dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

5. Variabel penelitian

Variabel penelitian menurut Sugiyono didefinisikan sebagai suatu karakteristik individu, obyek atau kegiatan yang memiliki perbedaan tertentu yang ditetapkan peneliti untuk menarik kesimpulan.³⁵ Dalam penelitian ini hanya terdapat satu variabel (variabel tunggal) yaitu kompetensi Satgas PPA dalam penanganan korban kekerasan di Kabupaten Bantul.

6. Metode Kuantitatif

a. Populasi dan sampel

Populasi didefinisikan sebagai lingkup penelitian yang terdiri atas subyek atau obyek dengan kuantitas maupun karakteristik tertentu.³⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Satgas PPA Kabupaten Bantul yang aktif dan terlibat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sugiyono mendefinisikan sampel sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik populasi tersebut. Dalam penelitian ini, sampel diambil dari total populasi

³⁵ *Ibid.* Hlm.35.

³⁶ *Ibid.* Hlm.35.

menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan data berdasarkan pertimbangan tertentu, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono.³⁷ Kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu responden merupakan anggota aktif Satgas PPA Kabupaten Bantul dengan masa keanggotaan minimal selama dua tahun dan sudah melakukan pendampingan pada korban kekerasan dengan pertimbangan bahwa masa kerja dan pengalaman anggota tersebut dianggap cukup untuk memiliki pemahaman terhadap tugas dan prinsip pelayanan Satgas PPA.

Mengingat keterbatasan waktu penelitian serta akses peneliti terhadap data anggota Satgas PPA, peneliti melakukan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner berbasis *Google Form* kepada anggota Satgas PPA melalui grup *WhatsApp*. Pengisian kuesioner tersebut dimulai 29 Mei sampai 6 Juni 2026. Untuk memastikan kesesuaian responden dengan kriteria yang telah ditetapkan, kuesioner dilengkapi dengan informasi responden. Dari total populasi sebanyak 110 anggota Satgas PPA Kabupaten Bantul, diperoleh 33 responden yang memenuhi kriteria dan bersedia mengisi kuesioner secara lengkap, sehingga jumlah tersebut ditetapkan sebagai sampel akhir dalam penelitian ini.

b. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi pada variabel yang diwujudkan dalam indikator untuk mengukur variabel tertentu dalam mendefinisikan suatu kegiatan atau operasional.³⁸ Kompetensi Satgas PPA diukur menggunakan skala

³⁷ *Ibid.* Hlm.35.

³⁸ M. Ilham Salim, "Penyusunan Kerangka Konseptual dan Definisi Operasional Konstruk atau Variabel Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif," *Tuladha; Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (2026): 1–6.

pengukuran yang berdasarkan pada teori kompetensi Spencer dan Spencer melalui instrumen penelitian yang diadaptasi dari kuesioner yang dikembangkan oleh Eko Hertanto dengan tetap mengacu pada lima karakteristik Spencer dan Spencer yaitu *motives, traits, self-concept, knowledge, dan skill*. Untuk memperjelas pengukuran pada variabel penelitian, peneliti akan menjabarkan definisi operasional dari variabel kompetensi Satgas PPA berdasarkan teori kompetensi Spencer dan Spencer yang disesuaikan dengan cakupan tugas Satgas PPA sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Aspek	Indikator
Kompetensi Satgas PPA	Kesiapan sikap, pengetahuan, dan keterampilan individu yang diwujudkan melalui karakteristik <i>motives, trait, self-concept, knowledge, dan skill</i> (Spencer & Spencer), dalam menjalankan tugas penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kompetensi Emosional (<i>Self-concept, Motives</i>)	1. Keyakinan diri - Kemampuan beradaptasi pada tugas - Keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki 2. Kemampuan mengendalikan diri/emosi - Tidak menghakimi korban - Tidak membedakan latar belakang korban - Pelaksanaan tugas bukan berdasar pada imbalan yang diterima 3. Bertanggung jawab - Menjaga kerahasiaan kasus dan identitas korban - Melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip Satgas PPA
		Kompetensi Intelektual (<i>knowledge</i>)	1. Penguasaan dasar hukum - Mengetahui adanya peraturan tertulis

			- Memahami standar operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Pemahaman tugas dan fungsi - Memahami tugas Satgas PPA - Memahami mekanisme layanan Satgas PPA 3. Keahlian praktik - Dapat membuat laporan secara tertulis - Dapat mengembangkan materi sosialisasi 4. Inisiatif - Mencari kebaharuan informasi terkait perlindungan perempuan dan anak - Meningkatkan keterampilan yang dimiliki dengan ikut pelatihan peningkatan kapasitas
		Kompetensi Sosial <i>(traits dan skill)</i>	1. Membangun hubungan kerja - Melakukan kerja sama internal antar anggota Satgas PPA - Dapat menjalin kerja sama dengan pihak eksternal 2. Menghormati keputusan bersama - Kesadaran akan bekerja dalam tim - Menghormati keputusan bersama 3. Mengembangkan dan mempengaruhi orang lain - Kemampuan melakukan identifikasi kasus

			- Kemampuan melakukan sosialisasi dan koordinasi
--	--	--	--

Sumber: Data Primer Peneliti

Kelima karakteristik tersebut kemudian disusun menjadi indikator yang terukur melalui ketiga jenis kompetensi Spencer dan Spencer dalam Eko Hertanto yaitu, kompetensi emosional (*motives* dan *self-concept*) yang terdiri dari keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki, pengendalian diri dalam merespons kondisi korban. Kompetensi intelektual (*knowledge*) terdiri dari kemampuan memahami tugas, fungsi, prosedur layanan, dasar hukum, serta inisiatif dalam mencari informasi terkait pelaksanaan tugas. Kemudian, dimensi kompetensi sosial (*traits* dan *skill*) terdiri dari kemampuan anggota dalam membangun relasi kerja sama dengan sesama anggota dan pihak terkait, kesadaran dalam berorganisasi, pemahaman situasi dan kemampuan melakukan komunikasi, mempengaruhi atau mengembangkan orang lain.³⁹

c. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan guna mengukur suatu gejala serta mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti berupa angket yang diberikan melalui *WhatsApp* kepada responden melalui pengisian *Google Form*. Angket tersebut digunakan untuk mengukur kompetensi Satgas PPA Kabupaten Bantul dalam

³⁹ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Kencana, 2009).

menjalankan praktik penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sehingga data dalam penelitian diperoleh melalui penghitungan skala likert dengan nilai 1 sampai 5, sebagai berikut.

Tabel 1. 2 Penilaian Angket

Keterangan	Kode	Skor setiap pertanyaan
Sangat Tidak Setuju	STS	1
Tidak Setuju	TS	2
Kurang Setuju	KS	3
Setuju	S	4
Sangat Setuju	SS	5

Sumber: Eko Hartanto, 2017

d. Uji Validitas

Uji Validitas dilakukan untuk memastikan setiap butir pernyataan kuesioner dapat mengukur dimensi kompetensi Satgas PPA Kabupaten Bantul.⁴⁰ Melalui uji validitas tersebut dapat diketahui sejauh mana suatu instrumen dapat menunjukkan sejauh mana insstrumen tersebut valid dan akurat. Dalam penelitian ini, uji validitas instrumen menggunakan rumus *Product Momen Pearson*, yaitu :

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \cdot \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

N = Jumlah responden

r_{xy} = Koefisien korelasi

X = Skor tiap butir

Y = Skor total

⁴⁰ Nurhan Buka et al., "Peran Validitas dan Rehabilitas dalam Evaluasi Pembelajaran," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 02, no. 11 (2025): 224–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15557188>.

Kriteria pengambilan keputusan validitas instrumen adalah sebagai berikut.

- 1) Jika nilai r hitung $> r$ tabel pada taraf signifikansi 0,05, maka butir pernyataan dinyatakan valid.
- 2) Jika nilai r hitung $\leq r$ tabel, maka butir pernyataan dinyatakan tidak valid dan tidak digunakan dalam penelitian.

Dengan demikian, diperoleh hasil pertanyaan yang dianggap valid akan digunakan dalam penelitian selanjutnya.

e. Uji Reabilitas

Uji Reabilitas dilakukan setelah melakukan uji validitas instrumen, digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen dalam mengukur variabel penelitian. Instrumen yang sudah dinyatakan reliabel, mampu menghasilkan data yang dapat dipercaya sehingga menunjukkan data yang konsisten meskipun diambil secara berulang. Instrumen dalam penelitian ini berbentuk skala likert, sehingga uji reabilitas instrumen diukur menggunakan rumus *Alpha Cronbatch*. Menurut Taherdoost dalam penelitian Fitria, dkk menyatakan bahwa instrumen dinyatakan konsisten atau reliabel apabila diperoleh nilai > 60 .⁴¹

$$r_{11} = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Keterangan :

$$\begin{array}{ll} r_{11} &= \text{Reliabilitas instrumen} \\ k &= \text{Banyaknya butir pertanyaan} \end{array} \quad \begin{array}{ll} \sum \sigma b^2 &= \text{Jumlah varian butir} \\ \sigma_t^2 &= \text{Varian total} \end{array}$$

⁴¹ Fitria Dewi Puspita Angraini et al., “Pembelajaran Statistika Menggunakan Software SPSS untuk Uji Validitas dan Reliabilitas,” *Jurnal Basicedu* 6, no. 4 (2022): 6491–6504.

f. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan melalui metode statistik deskriptif, yaitu cara menguraikan data dengan menggambarkan atau menampilkan data yang telah dikumpulkan tanpa bermaksud menarik kesimpulan atau menggeneralisasi data tersebut pada kelompok yang lebih besar. Olah data kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) dengan analisis statistik deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menyajikan data kompetensi Satgas PPA Kabupaten Bantul secara sistematis tanpa bermaksud membuat generalisasi serta menguji hipotesis.

Tahapan analisis data kuantitatif dilakukan berdasarkan pendekatan statistik hipotetik Azwar yang dilakukan dengan menghitung keseluruhan skor dengan tahapan analisis data kuantitatif yang dilakukan sebagai berikut.⁴² Pada tahap pertama, setelah dilakukan *coding* data, selanjutnya dilakukan penghitungan statistik hipotetik dengan rumus sebagai berikut.

Tabel 1. 3 Rumus Nilai Hipotetik

1.	Skor minimal	=	Jumlah soal	x	Nilai terendah
2.	Skor Maksimal	=	Jumlah soal	x	Nilai tertinggi
3.	Range	=	Skor maksimal	-	Skor terendah
4.	Standar Deviasi	=	Range	:	6
5.	Mean	=	(Skor Maksimal +Skor terendah)	:	2

Sumber: Azwar, 2012

⁴² Hanif Akhtar, "Cara Membuat Kategorisasi Data Penelitian dengan SPSS," Semesta Psikonometrika, 2018, <https://www.semestapsikometrika.com/2018/07/membuat-kategori-skor-skala-dengan-spss.html>.

Setelah diketahui nilai hipotetik tersebut, tahapan berikutnya adalah melakukan kategorisasi dengan menetapkan tiga kategori (rendah, sedang, tinggi) melalui rumus berikut.

Tabel 1. 4 Rumus Kategorisasi Kompetensi

Rendah	=	$X < M - 1 \text{ Standar deviasi}$
Sedang	=	$M - 1 \text{ Standar Deviasi} \leq X < M + 1 \text{ Standar deviasi}$
Tinggi	=	$M + 1 \text{ Standar Deviasi} \leq X$

Sumber: Azwar, 2012

7. Metode Kualitatif

a. Metode Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sampel informan wawancara penelitian ditentukan menggunakan teknik *representatif sampling*, yaitu sampel yang dapat digunakan untuk menggambarkan karakteristik dari populasi secara akurat dari populasi yang diteliti.⁴³ Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pengkategorian tingkat kompetensi Satgas PPA dalam penelitian kuantitatif untuk menetapkan informan. Proses wawancara penelitian ini berlangsung mulai dari tanggal 20-28 Juni 2026. Peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, dimana wawancara dilakukan secara mengalir akan tetapi peneliti tetap berpegang terhadap pedoman yang telah dibentuk sebelumnya. Informan penelitian dipilih dari masing-masing kategori kompetensi tinggi, sedang dan rendah yang diwakili oleh 2 orang.

⁴³ Ranga Gustiawan Nazara, "Teknik Penentuan Populasi dan Sampel dalam Penelitian Pendidikan," *Jurnal Pendidikan dan Bahasa* 3, no. 1 (2026): 214–25, <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Dilan/article/view/2932/3050>.

Peneliti melakukan observasi non-partisipan, dimana peneliti hanya mengamati kondisi subyek di lapangan tanpa terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Satgas PPA Kabupaten Bantul di lapangan. Salah satu observasi yang dilakukan, peneliti mengikuti kegiatan *monitoring* dan evaluasi Satgas PPA Kabupaten Bantul. Selain itu, peneliti melakukan pengamatan terhadap subyek selama proses wawancara berlangsung. Teknik dokumentasi juga digunakan sebagai pelengkap data wawancara dan observasi dalam penelitian ini. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan serta menelaah berbagai dokumen yang relevan dengan pelaksanaan tugas Satgas PPA Kabupaten Bantul. Dokumen tersebut meliputi struktur organisasi, pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan korban, prinsip-prinsip Satgas PPA, bagan mekanisme pelayanan Satgas PPA Kabupaten Bantul dan dokumen arsip data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bantul.

b. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk mengelompokkan, memahami dan mengartikan data-data yang diperoleh agar dapat diketahui makna dari informasi yang diberikan. Peneliti menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Huberman yang menjelaskan proses analisis data, melalui (1) *Data collection* atau pengumpulan data; (2) *Data reductions* atau reduksi data; (3) *Data display* atau penyajian data; (4) *Conclusion drawing* atau penarikan kesimpulan.⁴⁴

⁴⁴ Ibid. Hlm.35.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara responden yang diwakili oleh 2 informan dari masing-masing tingkat kompetensi, kategori kompetensi tinggi diwakili oleh informan HTS dan AYL, kategori kompetensi sedang diwakili oleh informan ISD dan MTH, serta kategori kompetensi rendah diwakili oleh informan TSY dan NKS. Dalam melakukan wawancara berada di tempat yang tertutup sehingga hasil wawancara dapat dijaga. Selanjutnya proses reduksi data dilakukan dengan cara memilah, memfokuskan, dan mengorganisasikan data hasil wawancara dengan pengkodean sesuai tema yang dianalisis. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi informasi yang relevan dengan fokus penelitian yaitu terkait dimensi kompetensi emosional, intelektual, sosial yang ditunjukkan oleh pernyataan informan.

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis agar mudah dipahami. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tema-tema penelitian, sehingga hubungan antar kategori dapat terlihat secara jelas dan terstruktur. Pada tahap akhir dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan pola, tema, dan hubungan yang ditemukan dalam data. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi serta dideskripsikan dengan rinci dan jelas sesuai fakta di lapangan tanpa dilebih-lebihkan.

c. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh melalui triangulasi teknik, yaitu dengan memeriksa data dari sumber yang sama menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian digunakan untuk membandingkan hasil

temuan data dari ketiga teknik tersebut. Melalui proses triangulasi ini, diharapkan data yang dihasilkan tidak hanya sahih, tetapi juga mampu memberikan gambaran yang lebih utuh dan mendalam mengenai penerapan kompetensi Satgas PPA Kabupaten Bantul.

8. Metode Kombinasi (*Mixed Methods*)

Data kombinasi dari penelitian ini merupakan pencampuran antara data kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan instrumen skala kompetensi Satgas PPA dalam penanganan korban kekerasan di Kabupaten Bantul. Kemudian data kuantitatif dianalisis menggunakan SPSS. Berdasarkan perolehan hasil kuantitatif kemudian dianalisis lebih dalam dengan metode kualitatif. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai kompetensi Satgas PPA Kabupaten Bantul yang berlandaskan perolehan hasil data kuantitatif. Dengan demikian, data kombinasi yang terdiri dari campuran data kuantitatif dan kualitatif bertujuan untuk mendapatkan informasi sedalam-dalamnya sehingga mendapatkan hasil temuan yang akurat.

Peneliti menggunakan model *sequential explanatory* berurutan, dimana metode pertama dengan pendekatan kuantitatif deskriptif dan metode kedua dengan pendekatan kualitatif. Melalui model tersebut, peneliti melakukan pengukuran kompetensi Satgas PPA melalui kuesioner yang telah dibagikan kemudian melakukan observasi dan wawancara mendalam berdasarkan hasil penghitungan data kuantitatif. Proses pencampuran data dalam strategi ini terjadi ketika hasil awal kuantitatif menginformasikan proses pengumpulan data kualitatif.

Adapun langkah-langkah analisis data *sequential explanatory* menurut Creswell sebagai berikut :

- a. Tahap pertama, peneliti mengumpulkan data kuantitatif berupa instrumen skala kompetensi Satgas PPA Kabupaten Bantul melalui *Google Form*.
- b. Tahap kedua, Peneliti melakukan analisis data kuantitatif dengan menganalisis hasil instrumen skala kompetensi Satgas PPA Kabupaten Bantul menggunakan Microsoft Excel.
- c. Tahap ketiga, mengumpulkan data kualitatif dengan teknik wawancara terstruktur kepada narasumber terpilih.
- d. Tahap keempat, melakukan analisis data kualitatif dengan triangulasi sumber hingga mencapai titik jenuh dan hasil akurat.
- e. Tahap kelima, peneliti memaparkan temuan data kuantitatif, kualitatif dan *mixed methods* dengan memberikan penjelasan secara mendalam terhadap hasil temuan penelitian di lapangan.⁴⁵

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun untuk mempermudah penyajian data dan uraian pembahasan secara terstruktur sehingga mudah dipahami oleh khalayak umum diantaranya sebagai berikut:

BAB I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

⁴⁵ Ibid. Hlm.35.

BAB II, menyajikan gambaran umum lembaga atau Satgas PPA yang menjadi lokasi penelitian, meliputi profil, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta mekanisme pelaksanaan tugas dalam penanganan kasus.

Bab III, menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup temuan kuantitatif mengenai tingkat kompetensi, temuan kualitatif untuk memperdalam hasil analisis, serta integrasi kedua temuan dalam kerangka *mixed methods sequential explanatory*.

BAB IV, merupakan bagian akhir yang menjelaskan terkait rangkuman atau kesimpulan terkait hasil penelitian, saran dan rekomendasi, serta pencantuman lampiran-lampiran pada akhir penulisan penelitian.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai kompetensi Satgas PPA Kabupaten Bantul dalam perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak, yang dianalisis menggunakan pendekatan *mixed method* jenis *explanatory sequential* dan dikaji melalui teori kompetensi Spencer dan Spencer, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kompetensi Satgas PPA Kabupaten Bantul

Berdasarkan hasil analisis data kuantitatif terhadap 33 responden anggota Satgas PPA Kabupaten Bantul dapat diketahui bahwa mayoritas Satgas PPA berada pada kategori kompetensi tinggi sebanyak 24 responden (73%), diikuti kategori kompetensi sedang sebanyak 7 responden (21%), dan kategori kompetensi rendah sebanyak 2 responden (6%). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar responden anggota Satgas PPA Kabupaten Bantul telah memiliki bekal kompetensi emosional, intelektual dan sosial yang memadai dalam menjalankan tugas penanganan dan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Meskipun demikian, keberadaan responden pada kategori sedang dan rendah menunjukkan masih perlunya pelatihan dan peningkatan kapasitas yang bertujuan untuk memastikan seluruh anggota Satgas PPA Kabupaten

Bantul dapat menjalankan tugas secara optimal dan merata dalam perlindungan perempuan dan anak.

2. Penerapan Kompetensi Satgas PPA Kabupaten Bantul

Hasil analisis data kualitatif penerapan kompetensi Satgas PPA terhadap enam informan dari setiap kategori ditunjukkan melalui, kategori kompetensi tinggi diwakili oleh informan HTS dan AYL, kategori sedang diwakili oleh ISD dan MTH serta kategori rendah yaitu informan TSY dan NKS menunjukkan bahwa penerapan kompetensi Satgas PPA di lapangan secara umum mengonfirmasi arah temuan kuantitatif yang memperkaya pemaknaannya. Pada dimensi emosional, seluruh informan lintas kategori menunjukkan penerapan prinsip-prinsip dasar Satgas PPA yang relatif konsisten, seperti sikap tidak menghakimi korban, menjaga kerahasiaan identitas dan informasi korban, menjadi teman aman, bekerja secara sukarela serta menghormati keputusan akhir yang diambil oleh korban maupun keluarganya.

Perbedaan yang menonjol terletak pada dimensi kompetensi intelektual dan sosial. Informan dengan kategori kompetensi tinggi menunjukkan pemahaman prosedural yang cukup, inisiatif dalam mengembangkan materi sosialisasi, serta jejaring kerja sama yang luas baik secara struktural formal maupun lintas sektor. Informan kategori sedang menunjukkan pola perilaku yang secara substansi banyak menyerupai kategori tinggi, khususnya dalam pengendalian diri dan kemampuan berpikir analitik. Informan kategori kompetensi rendah menunjukkan dimensi kompetensi intelektual yang cukup baik meskipun masih terdapat keterbatasan dalam pemahaman dasar hukum. Selanjutnya, pada dimensi kompetensi sosial, kemampuan dalam melakukan sosialisasi dan koordinasi internal relatif seimbang.

Namun, dalam koordinasi eksternal dengan berbagai pihak terkait dalam penanganan kasus, masih terdapat beberapa informan yang belum melakukan koordinasi secara mandiri, dimana informan melakukan koordinasi berdasarkan arahan dan tugas dari Ketua Satgas PPA Kabupaten Bantul.

Meskipun demikian, penerapan kompetensi Satgas PPA Kabupaten Bantul dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan tergolong dalam kompetensi yang baik. Hasil kompetensi Satgas PPA Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa mayoritas Satgas PPA termasuk dalam kategori kompetensi tinggi sejalan dengan hasil penerapan kompetensi di lapangan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dan petunjuk teknis pelaksanaan penanganan masalah perempuan dan anak yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, khususnya terkait kesenjangan yang lebih menonjol pada dimensi kompetensi intelektual dan sosial dibandingkan dimensi emosional, peneliti mengajukan beberapa saran praktis sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bantul, program peningkatan kapasitas Satgas PPA dapat ditambahkan kuota peserta dan dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Kemudian, peningkatan kapasitas dapat difokuskan pada pelatihan konseling dan pemahaman prosedur pendampingan korban kekerasan yang diatur dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2017.

Mengingat kedua aspek tersebut masih menjadi poin yang cukup lemah pada pemahaman regulasi formal dan dalam melakukan proses identifikasi korban dari kategori kompetensi rendah hingga kategori kompetensi tinggi.

2. Bagi anggota dan pengurus Satgas PPA Kabupaten Bantul, kompetensi yang dimiliki telah diterapkan pada pelaksanaan tugas dengan baik. Namun, masih diperlukan penyesuaian tugas koordinasi eksternal secara bertahap, sehingga dapat menciptakan kemampuan dalam melakukan jejaring sosial melalui membangun komunikasi dengan pihak eksternal seperti UPTD PPA, kepolisian, maupun instansi lainnya. Dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan pelatihan diharapkan anggota dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan mengutamakan partisipasinya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, mengingat jumlah responden kuantitatif dan informan kualitatif dalam penelitian ini masih terbatas sehingga hasil analisis belum sepenuhnya dapat digeneralisasikan untuk menggambarkan keseluruhan populasi penelitian. Sehingga diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan total sampling untuk mengetahui sejauh mana kompetensi Satgas PPA Kabupaten Bantul secara keseluruhan. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah penelitian ke kabupaten/kota lain, atau membandingkan kompetensi Satgas PPA antar wilayah, guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh terkait faktor-faktor yang memengaruhi keragaman kompetensi satuan tugas penanganan masalah perempuan dan anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Utari Murni, dan Susi Sulandari. “Peran Satgas Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri.” *Jurnal of Public Policy and Management Review* 8, no. 2 (2019): 469–81. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/23695>.
- Akhtar, Hanif. “Cara Membuat Kategorisasi Data Penelitian dengan SPSS.” *Semesta Psikonometrika*, 2018. <https://www.semestapsikometrika.com/2018/07/membuat-kategori-skor-skala-dengan-spss.html>.
- Alhakim, Abdurrahman. “Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia” 9, no. 1 (n.d.). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.
- Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. “Data Jumlah Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Indonesia Tahun 2025,” 2025. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Anggraini, Fitria Dewi Puspita, Aprianti, Vilda Ana Veria Setyawati, dan Agnes Angelia Hartanto. “Pembelajaran Statistika Menggunakan Software SPSS untuk Uji Validitas dan Reliabilitas.” *Jurnal Basicedu* 6, no. 4 (2022): 6491–6504.
- “Arti Kata ‘Kompetensi’ menurut KBBI.” KBBI.co.id. Diakses 1 Februari 2026. <https://kbbi.co.id/arti-kata/kompetensi>.
- AYL. “Wawancara Kategori Kompetensi Tinggi,” 2026.
- Bird, Karen Schucan, Nicola Stokes, dan Carol Rivas. “Training Informal Supporters to Improve Responses to Victim-Survivors of Domestic Violence and Abuse: A Systemic Review.” *Trauma, Violence and Abuse* 25, no. 2 (2024). <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/15248380231189191>.
- Buka, Nurhan, Mutiah Ayu Jayamin, Nur Kholis, Nursalam, dan Nur Akbar Rasyid. “Peran Validitas dan Rehabilitas dalam Evaluasi Pembelajaran.” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 02, no. 11 (2025): 224–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15557188>.
- Butarbutar, Marisi, Hastin Umi Anisah, dan Dkk. *Buku Digital Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner*. CV. Media Sains Indonesi, 2022. [https://repo-dosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/33948/Buku Digital -Pengantar Metodologi Penelitian.pdf?sequence=1](https://repo-dosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/33948/Buku%20Digital%20-Pengantar%20Metodologi%20Penelitian.pdf?sequence=1).
- Disdukcapil. *Buku Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul Semester II Tahun 2025*, 2025. <https://disdukcapil.bantulkab.go.id/storage/disdukcapil/menu/471/Buku->

Data-Agregat-Kependudukan-Kabupaten-Bantul-Semester-II-Tahun-2025.pdf.

“Dokumen Arsip Data Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bantul Tahun 2025, diakses pada 18 Juni 2026,” n.d.

Fionika, Deva, dan Ririn Indira Putri Enjel. “Perempuan Korban Kekerasan dalam Perspektif Penegakan Hukum dan Pemulihan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Kajian Hukum dan Pemulihan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2025): 88–96. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhpj>.

Furi, Viezna Leana, dan Rosalia Indriyati Saptatiningsih. “Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan.” *Jurnal Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020).

Hakim, Juhaidah Abd, dan Dalbir Singh. “Teori Kompetensi: Ulasan dari Perspektif Kemahiran Digital.” *Malaysian Journal of Information and Communication Technology* 5, no. 1 (2020): 1–23. <https://myjict.uis.edu.my/index.php/journal/article/view/113/71>.

Hawkes, Martine, Amanda Paton, dan Nada Ibrahim. “Meeting the Training Needs of a Child-Protection Workforce: Perspectives on Professional Certificates in Understanding, Assessing, and Responding to Childhood Trauma.” *Social Work Education* 44, no. 3 (2025): 431–51. <https://doi.org/10.1080/02615479.2024.2319253>.

Hertanto, Eko. *Toeri Kompetensi Sumber Daya Manusia*, 2017.

HTS. “Wawancara Kategori Kompetensi Tinggi,” 2026.

Hutapea, Parulian, dan Nurianna Thoha. *Kompetensi Plus*. PT Gramedia Pusaka Utama, 2008. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=BahfG7VnoiYC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Buku+kompetensi+Plus+Hutapea&ots=21fvJYJeJr&sig=1qbd0k4CvnBvyZ0voRui4JRkAPg&redir_esc=y#v=onepage&q=Buku kompetensi Plus Hutapea&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=BahfG7VnoiYC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Buku+kompetensi+Plus+Hutapea&ots=21fvJYJeJr&sig=1qbd0k4CvnBvyZ0voRui4JRkAPg&redir_esc=y#v=onepage&q=Buku%20kompetensi%20Plus%20Hutapea&f=false).

Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik. Petunjuk Teknis Pembentukan Satgas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (2017). <https://kemenpppa.go.id/buku/petunjuk-teknis-pembentukan-satuan-tugas-penanganan-masalah-perempuan-dan-anak-di-daerah>.

ISD. “Wawancara Kategori Kompetensi Sedang,” n.d.

Ismi, Julaili. “Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Riau.” Universitas Islam Riau, 2021. <https://repository.uir.ac.id/6105/>.

“Kondisi Geografis Kabupaten Bantul.” Diakses 4 Juni 2026.

https://bantulkab.go.id/data_pokok/index/0000000006/kondisi-geografis.html.

“Kukuhkan Satgas PPA, Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak di Bantul, diakses pada 16 Juni 2026,” 2023. <https://bantulkab.go.id/berita/detail/5936.html>.

Maulida, M. Jamil Yusuf, dan Syaiful Indra. “Peranan Pendamping Sosial Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).” *Indonesian Journal of Counseling & Development* 02, no. 01 (2020): 39–51. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/75029465/418-libre.pdf?1637639836=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DHubungan_Persepsi_Siswa_tentang_Pola_Asu.pdf&Expires=1786458259&Signature=BynAcpUbhDluk85g0yHAPX2G~vsdfoOzAQA7Qo10DKHKm-RhJIWnAI-fsS.

Moehariono. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Rajawali Pers, 2014.

MTH. “Wawancara Kategori Kompetensi Sedang,” n.d.

Muh.Zainul. “Wawancara Sejarah Pembentukan Satgas PPA Kabupaten Bantul,” n.d.

Muhammad Fahmi. “Peran DPPA Perlindungan Anak dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 10 (2023): 3320–24. <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/618>.

Mulyana, Nandang, Risna Resnawaty, dan Rudy Saprudin Darwis. “Model Pelayanan Sosial bagi Anak Korban Kekerasan.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 1, no. 2 (2019): 70–141. <https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/23241>.

Muyassaroh, Imroatul. “Implementasi Tugas Satgas PPA (Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak) Jombang terhadap Perlindungan Hak Anak di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023. http://digilib.uinsa.ac.id/65196/2/ImroatulMuyassaroh_C71219067.pdf.

Nazara, Rangga Gustiawan. “Teknik Penentuan Populasi dan Sampel dalam Penelitian Pendidikan.” *Jurnal Pendidikan dan Bahasa* 3, no. 1 (2026): 214–25. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Dilan/article/view/2932/3050>.

NKS. “Wawancara Kategori Kompetensi Rendah,” 2026.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, diakses 28 Maret 2026 (n.d.).

Prastini, Endang. “Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia.” *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 760–70.

<https://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/citizenshipvirtues/article/view/2043>.

Prayatna, Erisamdy. “Pengertian Korban,” 2020.
<https://www.erisamdyprayatna.com/2020/02/pengertian-korban.html>.

Purnani, Dwi, dan Muhammad Farid Ma’ruf. “Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif New Public Service (Studi pada Peran Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kelurahan Kaliombo Kota Kediri).” *The Journal of Universitas Negeri Surabaya* 6, no. 8 (2018).
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/24500>.

Salim, M.Ilham. “Penyusunan Kerangka Konseptual dan Definisi Operasional Konstruk atau Variabel Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.” *Tuladha; Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (2026): 1–6.
<https://journal.nubaninstitute.org/index.php/tuladha/article/view/402/83>.

Sari, Cindy Fatika, Ibnu Malik Assajad, dan Moch. Isa Ansori. “Kompetensi Individu (Individual Competency).” *Jurnal Ilmiah dan Karya Mahasiswa* 1, no. 4 (2023): 201–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jikma-itb.v1i3.467>.

Simamora, Mega Oktavia, Melani Octaviani, dan Dkk. “Dampak Kekerasan Rumah Tangga terhadap Gangguan Kedewasaan Anak.” *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 4 (2022): 122–31.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v2i4.783>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) Dengan 9 Desain*. CV Alfabeta, n.d.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta, 2023.

Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 173 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2025-2030 (n.d.).
<https://jdih.bantulkab.go.id/produkhukum/detail.html/6169/keputusan-bupati-tahun-2025-nomor-173>.

Sutrisno, Edy. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana, 2009.

TSY. “Wawancara Kategori Kompetensi Rendah,” 2026.

Zahra, Safrida. “Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023.” *Jurnal Gema Keadilan* 10, no. 3 (2023): 115–26.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2023.20385>.